



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas BerkatNya dan RahmatNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dapat disusun dengan baik.

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2019 adalah untuk memberi gambaran tentang penjabaran lebih rinci mengenai Program dan Kegiatan serta target capaian kinerja masing-masing yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2019 dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan, semoga dapat menjadi tolak ukur dan menjadi pedoman bagi semua pihak dan untuk mewujudkan Penegakan Perda, penegakan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 16 April 2018

KEPALA SATUAN, *T*

Drs. TOMMY HARUN, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA, IV-d
NIP. 19580610 198303 1 018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I		1
PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II		
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017		6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Reviw Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III		
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
3.3 Program dan Kegiatan	28
BAB IV		
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V		
PENUTUP	36



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA Organisasi Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2019.
3. RENJA Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA SATPOL PP Tahun 2019 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya



sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021.

Keberhasilan penegak Perda dan Perbup, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan sangat berdampak langsung dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan *Good Governance*. Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh APBD, namun hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem penegakan Perda, Perbup dan Ketertiban umum daerah saat ini mampu memberikan nuansa rasa Aman, Tertib dan Sejahtera.

Sesuai dengan PP Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dimana daerah memiliki urusan yang menjadi kewenangan, meliputi ***urusan wajib***, yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar.



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Penyempurnaan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. SK. KEP. LAN. Tahun 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP;
11. Permenpan dan RB. Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 Tentang EKPPD ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2019 dimaksudkan sebagai panduan menyusun dan merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran



berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dan juga melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2019 adalah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021

1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Awal RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2019 meliputi:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja selain merupakan wujud pertanggungjawaban Satpol PP Kabupaten Nunukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2017 dalam mewujudkan sasaran, tujuan, organisasi sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis lewat pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN NUNUKAN

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 (Tahun lalu n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018 (Tahun berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1 05 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	12		12	12	100	12	24	200
1 05 03 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	12		12	12	100	12	24	200
1 05 03 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12		12	12	100	12	24	200
1 05 03 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12		12	12	100	12	24	200
1 05 03 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa pemeliharaan Peralatan Kerja	12		12	12	100	12	24	200
1 05 03 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12		12	12	100	12	24	200
1 05 03 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12		12	12	100	12	24	200
1 05 03 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12		12	12	100	12	24	200



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 (Tahun lalu n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018 (Tahun berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 05 03 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12		12	12	100	12	24	200
1 05 03 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu / rapat	11		11	11	100	11	22	200
1 05 03 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Dokumen Koordinasi dan Konsultasi	90		90	90	100	90	180	200
1 05 03 01 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Koordinasi, Konsultasi, Integritas dan Sinergitas berjalan lancar	90		90	90	100	90	180	200
1 05 03 01 20	Penyediaan Jasa Umum Perkantoran	Tersedianya jasa umum perkantoran	12		12	12	100	12	24	200
1 05 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100					100		
1 05 03 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12		12	12	100	12	24	200
1 05 03 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya Kemampuan dan kapasitas serta pengetahuan personil satpol PP dalam melaksanakan tupoksi	8							
1 05 03 05 05	Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi PNS Daerah	Tersedianya SDM yang berkualitas dan berspesifikasi dalam melaksanakan tupoksi	98		40	23	57.50	7	30	30.61
1 05 03 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9							
1 05 03 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaporan dan Keuangan	9		9	9	100.00	9	18	200.00



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 (Tahun lalu n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018 (Tahun berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 05 03 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	19							
1 05 03 15 07	Konsolidasi dan pementapan tugas	Pelaksanaan Upacara HUT Satpol PP, bhakti praja, bhakti sosial dan kemasyarakatan yang dirangkai dengan sosialisasi Perda dan Perkada	1		1	1	100	1	2	200
1 05 03 16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRATIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Terselesainya permasalahan ketentraman, ketertiban dan keamanan (K3)	100							
1 05 03 16 07	Peningkatan kerjasama dengan aparat Penegak hukum dalam teknik pencegahan kejahatan dan penyelesaian permasalahan K3	Operasi penertiban pedagang kaki lima, penertiban PMKS, penertiban Pelajar/PNS/NON PNS, dan masalah K3 lainnya	100		100	100	100	100	200	200
1 05 03 16 08	Kegiatan patroli wilayah	Operasi pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	3		3	2	66.67	3	5	166.67
1 05 03 17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terciptanya tertib administrasi pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan	12							
1 05 03 17 58	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	12		12	12	100	12	24	200
1 05 03 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Terbentuknya satuan keamanan di lingkungan masyarakat	60							
1 05 03 19 01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di masyarakat	60		60	0	0	0	0	0



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Program Penegakan Peratura Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Perda dan Perkada.
 - b. Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada Masyarakat.
2. Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - a. Peningkatan kerjasama dengan aparat Penegak Hukum dalam teknik pencegahan kejahatan dan penyelesaian permasalahan K3.
 - b. Patroli Wilayah.

Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019

TABEL T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NUNUKAN

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat ketaatan masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah.			0	80%	83%	85%	0	107.50	83	85	
2	Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Keindahan.	100%	100%	0	100%	100%	100%	0	85.33	100	100	



1.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1.3.1. Tingkat Kierja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

Beberapa isu - isu strategis yang terjadi dan sangat terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP antara lain adalah masih adanya beberapa Perda yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan keindahan yang belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat ketaatan masyarakat dalam mentaati Perda. Terkait dengan rendahnya tingkat ketaatan masyarakat ini menjadi landasan bagi perumusan kebijakan serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti Organisasi Perangkat Daerah teknis pemangku Perda sebagai ujung tombak pelaksanaan sosialisasi Perda. Di samping itu, permasalahan strategis lainnya adalah kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), hal ini menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan penegakan Perda.

1.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam upaya melanjutkan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2016 – 2021, banyak menemui Berbagai Permasalahan dan Hambatan baik dari dalam (Intern) maupun dari luar (Eksteren). Untuk itu dituntut peran serta dan kerjasama yang sinergi dari seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, lintas instansi, Aparat penegak hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :



- a. Masih kurangnya PPNS dan juga Belum terbentuknya Sekretariat PPNS.
- b. Kurangnya aparatur yang menguasai permasalahan dengan spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni.
- c. Jumlah personil masih belum memadai dibanding dengan tugas, fungsi dan letak geografis wilayah yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan Negara lain.
- d. Kualitas manajerial personil yang belum memadai
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional yang masih kurang lengkap.
- f. Sebagian masyarakat belum taat melaksanakan Perda maupun Perkada.
- g. Sinergitas antar lembaga/instansi, Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum lainnya masih sangat kurang.

Dengan permasalahan dan hambatan tersebut diatas akan sangat berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang telah dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terhadap capaian program nasional terutama pada satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah menghadapi berbagai macam tantangan, diantaranya :



1. Masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan Bupati antara lain ditandai dengan :
 - a. Maraknya pembangunan rumah/toko/gedung baru yang tidak memiliki dan/atau tidak sesuai dengan IMB serta melewati GSB.
 - b. Hampir sebagian besar rumah/bangunan masyarakat dan Pemerintah yang telah ada di Nunukan belum memiliki IMB dan melewati GSB.
 - c. Maraknya *café/resto*, Tempat Hiburan Malam (THM), yang tidak sesuai dengan Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan hiburan umum, dan pengelolaan kebersihan.
 - d. Semakin banyaknya reklame ilegal yang tidak sesuai dengan Perda yang mengatur Penyelenggaraan reklame.
2. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Semakin maraknya peredaran dan penggunaan Narkoba di masyarakat termasuk kalangan PNS, remaja dan anak sekolah yang dapat memicu kenakalan remaja, pergaulan bebas dan tindakan kriminal lainnya.

Dengan adanya tantangan tersebut, maka peluang Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Melakukan Sosialisasi, Penertiban, Pengawasan dan Evaluasi demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Nunukan yang aman, tertib, tenteram dan berbudaya;
2. Melakukan pendeteksian dini untuk memperoleh informasi dan data terhadap potensi pelanggaran Perda;



3. Berpartisipasi aktif kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan – kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan mengajak kearah yang lebih positif;
4. Terjalannya koordinasi antara PD teknis sebagai pemangku Perda dan *Stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda;
5. Adanya dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa pada Rancangan awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2019, Prioritas Program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang tentunya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
2. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Secara spesifik review rancangan awal RKPD dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada **Tabel T-C.31.** sebagaimana terlampir:



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019

Tabel.T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Nunukan

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar 1 Dari 5

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kabupaten Nunukan	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 Bulan	4,191,568,084	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kabupaten Nunukan	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 Bulan	3,689,667,600	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Nunukan	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	12 Bulan	118,309,734	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Nunukan	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	12 Bulan	118,000,000	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Nunukan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	216,514,904	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Nunukan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	215,000,000	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Nunukan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,112,960	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Nunukan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9,000,000	
4	Peyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten Nunukan	Tersedianya jasa pemeliharaan Perlatan Kerja	12 Bulan	20,582,848	Peyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten Nunukan	Tersedianya jasa pemeliharaan Perlatan Kerja	12 Bulan	20,000,000	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Nunukan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	47,637,574	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Nunukan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	50,000,000	
6	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Kabupaten Nunukan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	34,503,040	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Kabupaten Nunukan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	35,000,000	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Nunukan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bulan	10,112,960	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Nunukan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bulan	9,000,000	
8	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Nunukan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	67,667,600	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Nunukan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	67,667,600	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Nunukan	Tersedianya makanan dan minuman tamu/rapat	11 Bulan	41,641,600	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Nunukan	Tersedianya makanan dan minuman tamu/rapat	11 Bulan	41,000,000	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Nunukan	Dokumen Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	123,437,600	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Nunukan	Dokumen Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	150,000,000	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Nunukan	Koordinasi, Konsultasi, Integritas dan Sinergitas berjalan lancar	12 Bulan	59,488,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Nunukan	Koordinasi, Konsultasi, Integritas dan Sinergitas berjalan lancar	12 Bulan	75,000,000	
12	Penyediaan jasa umum perkantoran	Kabupaten Nunukan	Tersedianya jasa umum perkantoran	12 Bulan	3,441,559,264	Penyediaan jasa umum perkantoran	Kabupaten Nunukan	Tersedianya jasa umum perkantoran	12 Bulan	2,900,000,000	



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar 2 Dari 5

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kabupaten Nunukan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	7,580,329,836	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kabupaten Nunukan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	7,580,329,836	
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Nunukan	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	60,632,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Nunukan	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	60,632,000	
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Nunukan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	55,349,836	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Nunukan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	55,349,836	
15	Pembangunan Gedung Tibum/Penegak Perda (Permanen)	Kabupaten Nunukan	Pembangunan Gedung Tibum/Penegak Perda (Permanen)	1 Paket	2,500,000,000	Pembangunan Gedung Tibum/Penegak Perda (Permanen)	Kabupaten Nunukan	Pembangunan Gedung Tibum/Penegak Perda (Permanen)	1 Paket	2,500,000,000	
16	Pembangunan Gedung Pertemuan dan Pendidikan	Kabupaten Nunukan	Pembangunan Gedung Pertemuan dan Pendidikan	95%	4,214,348,000	Pembangunan Gedung Pertemuan dan Pendidikan	Kabupaten Nunukan	Pembangunan Gedung Pertemuan dan Pendidikan	95%	4,214,348,000	
17	Pembangunan Pos Pengawasan Pelayanan Ketertiban Umum	Kecamatan Nunukan /Kecamatan Sebatik	Pembangunan Pos Pengawasan Pelayanan Ketertiban Umum	2 Unit	500,000,000	Pembangunan Pos Pengawasan Pelayanan Ketertiban Umum	Kecamatan Nunukan /Kecamatan Sebatik	Pembangunan Pos Pengawasan Pelayanan Ketertiban Umum	2 Unit	500,000,000	
18	Pengadaan Kendaraan Dinas/Patroli	Kabupaten Nunukan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Patroli	1 Unit	250,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Patroli	Kabupaten Nunukan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Patroli	1 Unit	250,000,000	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Meningkatnya kemampuan dan kapasitas serta pengetahuan personil sat Pol PP dalam melaksanakan Tupoksi	2 Orang	763,139,200	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Meningkatnya kemampuan dan kapasitas serta pengetahuan personil sat Pol PP dalam melaksanakan Tupoksi	2 Orang	765,569,600	
19	Pendidikan dan pelatihan formal	Bogor	Terlaksananya Diklat PPNS pada SATPOL PP dalam rangka meningkatkan efektivitas Penegakan Perda dan Perkada	1 Orang	40,000,000	Pendidikan dan pelatihan formal	Bogor	Terlaksananya Diklat PPNS pada SATPOL PP dalam rangka meningkatkan efektivitas Penegakan Perda dan Perkada	1 Orang	35,000,000	



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar 3 Dari 5

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi PNS Daerah	Jakarta/Surabaya	Tersedianya SDM yang berkualitas dan berspesifikasi dalam melaksanakan tupoksi	2 Orang	60,569,600	Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi PNS Daerah	Jakarta/Surabaya	Tersedianya SDM yang berkualitas dan berspesifikasi dalam melaksanakan tupoksi	2 Orang	60,569,600	
21	Pendidikan dan Pelatihan Dasar PNS Satpol PP	Bogor	Personil Satpol PP yang memiliki Kemampuan dan kapasitas serta pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi	20 Orang	400,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Dasar PNS Satpol PP	Bogor	Personil Satpol PP yang memiliki Kemampuan dan kapasitas serta pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi	20 Orang	400,000,000	
22	Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi Non PNS Daerah	Kabupaten Nunukan	Pendidikan dan Pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi Non PNS Satpol PP	50 Orang	150,000,000	Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi Non PNS Daerah	Kabupaten Nunukan	Pendidikan dan Pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi Non PNS Satpol PP	50 Orang	150,000,000	
23	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada Aparatur Satpol PP	Kabupaten Nunukan	Peningkatan pemahaman dan penguasaan Personil Satpol PP terhadap Perda dan Perkada	9 Perda	112,569,600	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada Aparatur Satpol PP	Kabupaten Nunukan	Peningkatan pemahaman dan penguasaan Personil Satpol PP terhadap Perda dan Perkada	9 Perda	120,000,000	
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kabupaten Nunukan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9 Dokumen	40,517,277	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kabupaten Nunukan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9 Dokumen	40,517,277	
24	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaporan dan Keuangan	9 Dokumen	40,517,277	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaporan dan Keuangan	9 Dokumen	40,500,000	
V	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Kabupaten Nunukan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	19 Kecamatan	867,586,723	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Kabupaten Nunukan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	19 Kecamatan	870,000,000	
25	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kabupaten Nunukan	Pelatihan Satlinmas (Pamsung)	19 Kecamatan	700,000,000	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kabupaten Nunukan	Pelatihan Satlinmas (Pamsung)	19 Kecamatan	700,000,000	



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar 4 Dari 5

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Konsolidasi dan pemantapan tugas	Kabupaten Nunukan	Pelaksanaan Upacara HUT Satpol PP, bhakti praja, bhakti sosial dan kemasyarakatan yang dirangkai dengan sosialisasi Perda dan Perkada	1 Kegiatan	63,586,723	Konsolidasi dan pemantapan tugas	Kabupaten Nunukan	Pelaksanaan Upacara HUT Satpol PP, bhakti praja, bhakti sosial dan kemasyarakatan yang dirangkai dengan sosialisasi Perda dan Perkada	1 Kegiatan	70,000,000	
27	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Nunukan	Terwujudnya pengawasan evaluasi dan pelaporan	12 Bulan	104,000,000	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Nunukan	Terwujudnya pengawasan evaluasi dan pelaporan	12 Bulan	100,000,000	
VI	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRATIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Kabupaten Nunukan	Terselesaikannya masalah permasalahan ketentraman, ketertiban dan keamanan	100%	697,977,463	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRATIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Kabupaten Nunukan	Terselesaikannya masalah permasalahan ketentraman, ketertiban dan keamanan	100%	585,000,000	
28	Peningkatan kerjasama dengan aparat Penegak hukum dalam teknik pencegahan kejahatan dan penyelesaian permasalahan K3	Kabupaten Nunukan	operasi penertiban pedagang kaki lima, penertiban PMKS, penertiban Pelajar/PNS/NON PNS, dan masalah K3 lainnya	100 Operasi	278,854,759	Peningkatan kerjasama dengan aparat Penegak hukum dalam teknik pencegahan kejahatan dan penyelesaian permasalahan K3	Kabupaten Nunukan	operasi penertiban pedagang kaki lima, penertiban PMKS, penertiban Pelajar/PNS/NON PNS, dan masalah K3 lainnya	100 Operasi	235,000,000	Program dan Kegiatan yang mendukung IKU 2016 - 2021
29	Kegiatan patroli wilayah	Kabupaten Nunukan	Terlaksananya patroli wilayah untuk memantau obyek vital, kawasan rawan tertib sosial dan fasum	3 Kali/Hari	419,122,704	Kegiatan patroli wilayah	Kabupaten Nunukan	Terlaksananya patroli wilayah untuk memantau obyek vital, kawasan rawan tertib sosial dan fasum	3 Kali/Hari	350,000,000	Program dan Kegiatan yang mendukung IKU 2016 - 2021
VII	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBA NGAN PENGELOLAAN KEU ANGAN DA ERAH	Kabupaten Nunukan	Terciptaanya tertib administrasi pelaporan keuangan dan akuntabel dan transparan	12 Bulan	1,595,789,395	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBA NGAN PENGELOLAAN KEU ANGAN DA ERAH	Kabupaten Nunukan	Terciptaanya tertib administrasi pelaporan keuangan dan akuntabel dan transparan	12 Bulan	1,595,789,395	
30	Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan Daerah	Kabupaten Nunukan	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	12 Bulan	1,595,789,395	Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan Daerah	Kabupaten Nunukan	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	12 Bulan	1,595,789,395	



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar 5 Dari 5

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah	Kabupaten Nunukan	Meningkatnya Ketaatan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	83%	483,928,931	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya di daerah	Kabupaten Nunukan	Meningkatnya Ketaatan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	83%	429,000,000	
31	Peningkatan Pengawasan pengendalian dan penegakan perda	Kabupaten Nunukan	Operasi pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	20 Kali	340,265,411	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya di daerah	Kabupaten Nunukan	Operasi pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	20 Kali	301,000,000	Program dan Kegiatan yang mendukung IKU 2016 - 2021
32	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	Kabupaten Nunukan	Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	6 Kecamatan	143,663,520	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	Kabupaten Nunukan	Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	6 Kecamatan	128,000,000	Program dan Kegiatan yang mendukung IKU 2016 - 2021
					16,220,836,909					15,555,873,708	



1.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Pada pelaksanaan forum Musrenbang tingkat kecamatan se Kabupaten Nunukan terdapat beberapa usulan/masukkan maupun rekomendasi untuk menjadi program/kegiatan Satuan polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun usulan tersebut sudah merupakan bagian dari tugas fungsi dan sudah diakomodir dalam rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2019 sehingga tidak dicantumkan kedalam usulan pada forum Musrenbang tingkat Kecamatan.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019 Kabupaten Nunukan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar/Volume	Catatan
	NIHIL				



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa *Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.* Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada.

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
“Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.



Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011 pasal 2 (1) disebutkan bahwa "*Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*". Dalam pasal 3 disebutkan bahwa "*Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat*".

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Satpol PP Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Mewujudnya peningkatan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
3. Mewujudkan peningkatan Kapasitas SDM satpol PP yang kreatif, profesional, humanis, dan inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.



Sedangkan Sasaran dari RENJA Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang menggambarkan hal-hal yang akan dilakukan secara proporsional melalui program kegiatan yang bersifat spesifik, terinci serta dapat diukur serta dicapai. Berdasarkan maksud penetapan sasaran dalam kurun waktu satu tahun yang akan dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya penegakan perda dan Peraturan Kepala Daerah
2. Meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan
3. Meningkatnya kualitas dan integritas Aparat Penegak Produk Hukum Daerah



Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN SATPOL PP TAHUN 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019
1	Mewujudkan Peningkatan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;	Meningkatkan Pelaksanaan Operasi dan Pengawasan dalam rangka Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat	Presentase tingkat ketaatan masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	85
2	Mewujudnya Peningkatan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;	Meningkatkan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam menjaga Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Presentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan	100
3	Mewujudkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP yang Kreatif, Profesional, Humanis, dan Inovatif dalam melaksanakan tupoksi	Meningkatnya kualitas dan integritas Aparat Satpol. PP Terwujudnya aparat Satpol PP yang Profesional	Rasio Personil PPNS pada SATPOL PP Rasio Personil SATPOL PP yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dasar	50 82.30



3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah merupakan implementasi tugas yang dilaksanakan secara nyata dan terpadu yang merupakan Kebijakan sebagai arah dan juga dijadikan sebagai Pedoman, pegangan, petunjuk aparatur Pemerintah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan tugas dalam upaya mencapai sasaran, Tujuan, yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian **Visi dan Misi** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dapat dituangkan lewat Rancangan Awal RENJA ini, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yakni Tahun 2019 dapat diuraikan Pada Tabel T-C. 33 berikut ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- d. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan alat tulis kantor;
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor;
- i. Penyediaan makan dan minum kantor;
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- k. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- l. Penyediaan jasa umum perkantoran;



2. Peningkatan Sarana dan Prasarana;

- a. Pengadaan perlengkapan Gedung kantor;
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- c. Pembangunan Gedung Tibum/Penegak Perda (Permanen);
- d. Pembangunan Gedung Pertemuan dan Pendidikan;
- e. Pembangunan Pos Pengawasan dan Ketertiban Umum;
- f. Pengadaan Kendaraan Dinas/Patroli

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

- a. Pendidikan dan pelatihan formal;
- b. Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi PNS Daerah;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP;
- d. Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi Non PNS Satpol PP;
- e. Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kepada Aparatur Satpol PP;

4. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

- a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Konsolidasi dan Pemantapan Tugas;

5. Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;

- a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan dan penyelesaian permasalahan keamanan ketertiban dan keindahan (K3);
- b. Kegiatan Patroli Wilayah;



- 6. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah;**
 - a. Sosialisasi produk hukum Daerah kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan Pengawasan, Pengendalian, Penegakan Perda dan Perkada;

- 7. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;**
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

- 8. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**
 - Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019

TABEL T-C.33.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

Lembar 1 Dari 4

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.3.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	3,689,667,600	APBD II		12 Bulan	3,837,254,304
1.05.3.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	118,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 122,720,000
1.05.3.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	215,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 223,600,000
1.05.3.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	9,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 9,360,000
1.05.3.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa pemeliharaan Peralatan Kerja	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	20,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 20,800,000
1.05.3.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	50,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 52,000,000
1.05.3.01.11	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	35,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 36,400,000
1.05.3.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	9,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 9,360,000
1.05.3.01.13	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	67,667,600	APBD II		12 Bulan	Rp 70,374,304
1.05.3.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu/rapat	Kabupaten Nunukan	11 Bulan	41,000,000	APBD II		11 Bulan	Rp 42,640,000
1.05.3.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dokumen Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Nunukan	90%	150,000,000	APBD II		90%	Rp 156,000,000
1.05.3.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Koordinasi, Konsultasi, Integritas dan Sinergitas berjalan lancar	Kabupaten Nunukan	90%	75,000,000	APBD II		90%	Rp 78,000,000
1.05.3.01.20	Penyediaan jasa umum perkantoran	Tersedianya jasa umum	Kabupaten	12 Bulan	2,900,000,000	APBD II		100%	Rp 3,016,000,000



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019

Lembar 2 Dari 4

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.3.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Kabupaten Nunukan	100%	Rp 7,580,329,836	APBD II		100%	Rp 911,021,109
1.05.3.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Nunukan	100%	60,632,000	APBD II		100%	Rp 63,057,280
1.05.3.02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	55,349,836	APBD II		12 Bulan	Rp 57,563,829
1.05.3.02	Pembangunan Gedung Tibum/Penegak Perda (Permanen)	Pembangunan Gedung Tibum/Penegak Perda (Permanen)	Kabupaten Nunukan	1 Paket	2,500,000,000	APBD II			
1.05.3.02	Pembangunan Gedung Pertemuan dan Pendidikan	Pembangunan Gedung Pertemuan dan Pendidikan	Kabupaten Nunukan	95%	4,214,348,000	APBD II			
1.05.3.02	Pembangunan Pos Pengawasan Pelayanan Ketertiban Umum	Pembangunan Pos Pengawasan Pelayanan Ketertiban Umum	Kecamatan Nunukan/Kecamatan Sebatiki	2 Unit	500,000,000	APBD II		2 Unit	Rp 520,000,000
1.05.3.02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Patrol	Pengadaan Kendaraan Dinas/Patrol	Kabupaten Nunukan	1 Unit	250,000,000	APBD II		2 Unit	Rp 270,400,000
1.05.3.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kemampuan dan Kapasitas serta pengetahuan personil Satpol PP dalam Melaksanakan Tupoksi		2 Orang	Rp 765,569,600			1 Orang	Rp 380,192,384
1.05.3.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Diklat PPNS pada SATPOL PP dalam rangka meningkatkan efektivitas Penegakan Perda dan Perkada	Bogor	1 Orang	35,000,000	APBD II		1 Orang	Rp 36,400,000
1.05.3.05.05	Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi PNS Daerah	Tersedianya SDM yang berkualitas dan berspesifikasi dalam melaksanakan tupoksi	Jakarta/Surabaya	2 Orang	60,569,600	APBD II		2 Orang	Rp 62,992,384



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019

Lembar 3 Dari 4

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.3.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Dasar PNS Satpol PP	Personil Satpol PP yang memiliki Kemampuan dan kapasitas serta pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Bogor	20 Orang	400,000,000	APBD II			
1.05.3.05	Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi Non PNS Daerah	Pendidikan dan Pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi Non PNS Satpol PP	Kabupaten Nunukan	50 Orang	150,000,000	APBD II		47 Orang	Rp 156,000,000
1.05.3.05	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada Aparatur Satpol PP	Peningkatan pemahaman dan penguasaan Personil Satpol PP terhadap Perda dan Perkada	Kabupaten Nunukan	9 Perda	120,000,000	APBD II		13 Perda	Rp 124,800,000
1.05.3.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kabupaten Nunukan	9 Dokumen	Rp 40,575,000	APBD II		9 Dokumen	Rp 42,198,000
1.05.3.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaporan dan Keuangan	Kabupaten Nunukan	9 Dokumen	Rp 40,575,000	APBD II		9 Dokumen	Rp 42,198,000
1.05.3.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kabupaten Nunukan	19 Kecamatan	Rp 870,000,000	APBD II			Rp 176,800,000
1.05.3.15	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelatihan Satlinmas (Pamsung)	Kabupaten Nunukan	19 Kecamatan	700,000,000	APBD II			
1.05.3.15.07	Konsolidasi dan pemantapan tugas	Pelaksanaan Upacara HUT Satpol PP, bhakti praja, bhakti sosial dan kemasyarakatan yang dirangkai dengan sosialisasi Perda dan Perkada		1 Kegiatan	70,000,000	APBD II		1 Kegiatan	Rp 72,800,000



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019

Lembar 4 Dari 4

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.3.06	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Terwujudnya pengawasan evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	100,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 104,000,000
1.05.3.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRATIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Terselesaikannya permasalahan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Kabupaten Nunukan	100%	Rp 585,000,000	APBD II		100%	Rp 608,400,000
1.05.3.16.07	Peningkatan kerjasama dengan aparat Penegak hukum dalam teknik pencegahan kejahatan dan penyelesaian permasalahan K3	operasi penertiban pedagang kaki lima, penertiban PMKS, penertiban Pelajar/PNS/NON PNS, dan masalah K3 lainnya	Kabupaten Nunukan	100 Operasi	235,000,000	APBD II		100 Operasi	Rp 244,400,000
1.05.3.16.08	Kegiatan patroli wilayah	Terlaksananya patroli wilayah untuk memantau obyek vital, kawasan rawan tertib sosial dan fasum	Kabupaten Nunukan	3 kali sehari	350,000,000	APBD II		3 kali sehari	Rp 364,000,000
1.05.3.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terciptanya tertib administrasi yang akuntabel dan transparan	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	1,595,789,395	APBD II		12 Bulan	Rp 1,659,620,971
1.05.3.17.58	Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	1,595,789,395	APBD II		12 Bulan	Rp 1,659,620,971
1.05.3.28	PROGRAM PENEKAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA DI DAERAH	Meningkatnya Ketaatan Masyarakat terhadap produk hukum daerah	Kabupaten Nunukan	83%	Rp 429,000,000	APBD II		85%	Rp 446,160,000
1.05.3.28.01	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pengendalian dan Penegakan Perda dan Perkada	Operasi pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kabupaten Nunukan	20 Kali	301,000,000	APBD II		20 Kali	Rp 313,040,000
1.05.3.28.02	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	Kabupaten Nunukan	6 Kecamatan	128,000,000	APBD II		3 Kecamatan	Rp 133,120,000
T O T A L						Rp 15,555,931,431			Rp 8,061,646,768



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2019 dan prakiraan maju Tahun 2020 disajikan pada Tabel T-C.33 diatas sebagai Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan.



BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2019 sebagai suatu penjabaran dari RENSTRA Tahun 2016 - 2021 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan yang disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi serta kewenangan Satpol PP Kabupaten Nunukan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 disusun sebagai dasar pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dalam penegakan Perda dan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Dengan adanya Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Nunukan diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Nunukan dapat lebih terarah, terintegrasi dan terkoordinasi serta sinergitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini dijadikan sebagai bahan untuk Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Pelafond Anggaran Sementara (PPAS) yang dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Nunukan, 16 April 2018

KEPALA SATUAN, 


Drs. TOMMY HARUN, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA, IV-d
NIP. 19580610 198303 1 018